



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

**TANGGAPAN / JAWABAN KOMISI E DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KETENAGAKERJAAN**

Disampaikan oleh:

YOHANES WINARTO, SH, MH.

Yang Terhormat Sdr. Gubernur Jawa Tengah.

Yang saya hormati Sdr. Ketua, Wakil Ketua, dan rekan-rekan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Yang saya hormati segenap jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Tamu Undangan, Wartawan, dan Hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam Sejahtera dan Selamat Pagi untuk kita semua.

Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenanan-Nya hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat wal'afiat untuk menghadiri Rapat Paripurna dengan salah satu agenda memberikan Tanggapan/Jawaban Pengusul (Komisi E) terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas Penjelasan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Bapak/Ibu dan hadirin peserta Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati,

Pertama, kami ucapkan terimakasih atas pemandangan umum fraksi fraksi terkait Penjelasan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan hal ini menandakan bahwa telah menjadi *concern* kita bersama bagaimana ketenagakerjaan ini harus benar benar kita atur dan *design* untuk menjawab permasalahan dan tantangan penyelenggaraan ketenagakerjaan yang sekaligus memiliki implikasi luas dan makro terhadap pengurangan kemiskinan, pengurangan angka pengangguran yang pada ujungnya sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, bahwa kita sepakati bersama dengan terbitnya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus tetap kita respon dengan melihat dan menganalisis dampak positif yang tetap kita jalankan sesuai amanat Undang Undang Dasar 1945 bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang menimbulkan konsekwensi bahwa Pemerintah Daerah harus terus berupaya agar penyelenggaraan ketenagakerjaan mulai dari Perencanaan, Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja hingga Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja harus terlaksana dengan baik. Demikian juga dengan upaya perlindungan, jaminan sosial hingga penyelenggaraan hubungan industrial yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan

masyarakat pada umumnya dan masyarakat Jawa Tengah pada khususnya.

Ketiga, kita sepakati bersama bahwa setiap tenaga kerja berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak demi mewujudkan dan mempertahankan kelangsungan kehidupan yang sejahtera. Hal ini juga untuk menjawab tuntutan dan tantangan peningkatan kinerja penyelenggaraan ketenagakerjaan di Jawa Tengah termasuk dalam merespon kebijakan 9 (Sembilan) Lompatan Ketenagakerjaan Nasional.

Bapak/Ibu dan hadirin peserta Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati,

Mendasarkan pada tiga jawaban diatas, sekaligus menjawab dinamika kondisi, permasalahan dan tantangan dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan maka menjadi respon kita bersama untuk sama sama merumuskan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. Yang juga dapat mengungkit pencapaian target makro pembangunan daerah Jawa Tengah seperti pengurangan kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

Bapak/Ibu dan hadirin peserta Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati,

Demikian saya sampaikan, tanggapan/ jawaban atas Pemandangan Umum Fraski atas Penjelasan tentang Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang harapannya kedepan akan menjadi tanggungjawab kita

bersama dalam mengawal muatan pokok rancangan perda ini dalam rapat, pembahasan maupun forum/ dialog untuk mencapai tujuan/ *ultimate goal* mewujudkan peningkatan kesempatan dan kualitas tenaga kerja, hingga kesejahteraan tenaga kerja pada umumnya dan masyarakat Jawa Tengah pada khususnya.

Semarang, 5 Desember 2022

KOMISI E
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Ketua,



ABDUL HAMID, S.Pd.I